

Pariwisata Sebagai Faktor Pendukung Kesejahteraan Masyarakat

Oleh: Firman Syah

Program Studi MICE, Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Jakarta
firman_tegal@yahoo.com

Abstract

The ideals of the Indonesian people are very noble and prioritize the interests of the community. This concept is the initial foothold from the government, namely Article 33 of the 1945 Constitution. This means that citizens are an important part of tourist destinations. On this basis, the idea was born that tourism is a supporting factor for community welfare. This research activity uses qualitative methods. The results of research in the field that tourism that tourism program that can support the welfare of the community is the cooperation and coordination between the government and the community. Because the largest area is rural, the tourism sector can enter the countryside. The tourism model can be in the form of managed natural resources such as adventure tourism, agro tourism, marine tourism, culinary tourism, cultural and historical tourism, and creative tourism.

Keywords: Tourism, welfare, and society.

Abstrak

Cita-cita bangsa Indonesia pada dasarnya sangat mulia dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konsep dasar yang sudah dibentuk oleh pemerintah, yakni UUD 1945 Pasal 33. Artinya, warga merupakan bagian penting dari destinasi wisata. Atas dasar ini lahir pemikiran bahwa pariwisata sebagai faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Kegiatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Diperoleh bahwa program pariwisata yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat adalah atas kerjasama dan koordinasi pemerintah dengan masyarakat. Karena wilayah terbesar adalah pedesaan, maka ranah pariwisata bisa masuk ke pedesaan. Adapun model pariwisata dapat berupa kekayaan alam yang dikelola seperti wisata petualangan, wisata agro, wisata bahari, wisata kuliner, wisata budaya dan sejarah, dan wisata kreatif.

Kata Kunci: Pariwisata, Kesejahteraan, dan Masyarakat

1. Pendahuluan

Cita-cita bangsa Indonesia pada dasarnya sangat mulia dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari konsep dasar yang sudah dibentuk oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 (3) yakni “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Konsep tersebut jelas mengisyaratkan jika

pembangunan masyarakat lebih utama dan menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pemegang kebijakan. Artinya, ada satu aturan yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Sehingga ada satu kesatuan persepsi yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat, dan para investor dalam mencapai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat.

Temuan dari Cerro and et al. (2017) diungkapkan bahwa warga merupakan bagian penting dari destinasi wisata. Hal ini untuk mendapatkan pemahaman sikap masyarakat yang lebih terhadap pengembangan destinasi wisata. Sikap yang diperlukan dari masyarakat supaya menguntungkan dan dapat berkontribusi pada kesuksesan destinasi wisata. Dari sini diketahui pentingnya persepsi masyarakat dan keterikatan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup yang dirasakan dengan merencanakan dan mengembangkan proyek pariwisata. Dapat ditafsirkan masyarakat lokal harus diberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam usaha untuk mengembangkan destinasi wisata melalui persepsi yang dimiliki masyarakat pedesaan terkait niat dalam mendukung model pariwisata yang berkelanjutan.

Perlu diingat, ada beberapa hal yang menjadi landasan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan potensi. Hal ini juga sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 (4) dimana “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Tata laksana dari prinsip ini menjadi renungan bersama karena untuk kemakmuran seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Tak terkecuali mereka yang berada di pedesaan dan jauh dari kalimat ‘perhatian’. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan hidup antara mereka yang berada di perkotaan dan di pedesaan.

Kembali kepada hakikat kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lain untuk kebebasan bersama seluruh lapisan masyarakat. Model pengembangan perekonomian yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan amanat kepada masyarakat untuk benar-benar

direalisasikan. Dengan harapan seluruh kebijakan yang dibuat demi kelangsungan hidup seluruh ekosistem yang ada. Baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, termasuk potensi alam yang ada di dalamnya sehingga dimanfaatkan dengan bijak. Seluruh prinsip yang dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 33 (4) menjadi elemen dasar bagi *stakeholder* yakni pemerintah bersama-sama masyarakat saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan dengan basis kearifan lokal yang sarat kepentingan bersama. Sehingga kesejahteraan dan kemakmuran dapat dinikmati oleh semua kalangan.

Nichols and et al. (2015) mengungkapkan adanya program sukarela Olimpiade Ambassador untuk menciptakan warisan pariwisata berkelanjutan. Kontribusi acara ini terutama pada peran relawan yang mempromosikan pariwisata di tempat tersebut. Hasil temuan yang ada menunjukkan bahwa para sukarelawan meningkatkan pengalaman wisatawan selama Olimpiade, antusiasme, dan pengetahuan lokal yang dimiliki destinasi wisata. Walau program duta besar untuk menciptakan warisan tersebut dengan konsep berkelanjutan, ditambah kumpulan sukarelawan berpengalaman yang mendukung acara juga kunjungan wisatawan, akan tetapi program tersebut sangat dibatasi oleh pemotongan anggaran pemerintah daerah. Di luar itu masih ada pihak yang memberikan bantuan praktis untuk pengembangan dan menjadi kesempatan relawan untuk menyalurkan promosi pariwisata.

Artinya, keberadaan destinasi wisata dengan ragam model yang tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia sudah dapat diminati banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Melalui promosi seperti yang disampaikan oleh relawan tersebut suatu destinasi wisata tergolong baru pun dapat diaplikasikan dan

tenar dalam jangka waktu tertentu. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah konsep destinasi wisata untuk dikembangkan harus sesuai potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jika dalam masyarakat masih minim pengetahuan untuk mengelola bahkan mempromosikan destinasi wisata, langkah yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi rencana kerja dengan dikemas dalam program kerja harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan.

Coles and Fish (2017) menulis bahwa untuk mengatasi tantangan yang membatasi hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem memerlukan pemahaman lebih lengkap mengenai berbagai nilai dan manfaat yang diperoleh dari ekosistem, termasuk pariwisata. Perspektif layanan yang ditetapkan ekosistem ini menjadi lebih penting untuk kebijakan dan pengambilan keputusan. Pembentukan beberapa layanan Sub Global Assessments (SGA) juga seharusnya memasukkan ahli dan cendekiawan pariwisata yang memainkan peran untuk memproduksi wilayah dimana pariwisata merupakan lahan yang signifikan. Atas dasar inilah lahir pemikiran bahwa pariwisata sebagai faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana program pariwisata yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana model pariwisata yang masuk kategori kesejahteraan masyarakat?

2. Kajian Pustaka

Nichols and et al. (2017) menjelaskan beberapa dekade terakhir pedesaan mengalami krisis, sehingga mendorong inisiatif baru untuk mengembangkan kawasan tersebut melalui kegiatan pariwisata. Negara-negara di Eropa menghadapi masalah itu seperti penurunan pendapatan pertanian, perubahan nilai lahan,

dan pengangguran yang meningkat sebagai penyebab emigrasi angkatan kerja serta menimbulkan ketidakeimbangan demografis di pedesaan. Perlu penyesuaian struktur ekonomi dengan teknologi pertanian baru, teknologi informasi dan komunikasi, kondisi pasar, dan mencari diversifikasi ekonomi, inovasi, serta memperkuat daya saing. Pariwisata dianggap sebagai mekanisme pembangunan pedesaan, dengan pertimbangan pariwisata pedesaan lebih murah dan mudah diimplementasikan daripada strategi lain.

Karena pariwisata hanya membutuhkan investasi pemerintah daerah dan usaha yang relatif kecil. Akibatnya sekarang pariwisata pedesaan melengkapi sumber pendapatan lain di lingkungan pedesaan. Namun, peran pendukung ini hanya berkembang sepenuhnya dengan komersialisasi produk secara regional. Selain itu wisatawan yang datang ke pedesaan semakin memberi nilai keaslian, warisan, dan konten lokal pedesaan sebagai pengalaman berwisata. Hal ini membuat pedesaan mencari alternatif baru yang menawarkan pengalaman sekaligus melengkapi pendapatan masyarakat lokal melalui kegiatan wisata di pedesaan yang identik dengan tradisi kuno sebagai produk andalan yang berkembang. Karena konsep ini sebagai cara menciptakan pekerjaan baru untuk melestarikan destinasi wisata dan pengalaman baru bagi wisatawan.

Bagaimanapun kegiatan pariwisata yang dilaksanakan oleh pedesaan harus mendapatkan dukungan seluruh masyarakat agar produk wisata dengan kekhasan tertentu memiliki akar yang kuat yakni budaya lokal. Dengan demikian, masyarakat lokal sebagai bagian dari produk pariwisata dapat memastikan keberhasilan terutama dalam memberikan kepuasan kepada wisatawan. Supaya memperoleh manfaat ekonomi yang baik sampai tingkat daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), partisipasi masyarakat lokal juga harus

diintegrasikan melalui perencanaan pembangunan daerah oleh pemerintah setempat sehingga konsep pariwisata pedesaan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan secara utuh. Artinya, ada keterlibatan secara langsung dan nyata dari masyarakat dalam pembuatan kebijakan pembangunan pedesaan.

Ada usaha besar di pedesaan yang melibatkan banyak unsur melalui pentingnya masyarakat sebagai pemain kunci dalam pengembangan pariwisata pedesaan. Rancangan pariwisata pedesaan juga melibatkan penggunaan informasi sebagai pengalaman yang mencerminkan keistimewaan destinasi sebagai tempat tinggal sekaligus kebanggaan masyarakat lokal. Untuk itu, masyarakat harus lebih sadar akan arti pentingnya pengembangan pariwisata dalam kualitas hidup sehari-hari. Dengan demikian, model pariwisata pedesaan di masa depan perlu banyak belajar dari kegiatan pariwisata pedesaan yang sudah memiliki pemahaman lebih dalam memperbaiki kesuksesan masyarakat ke depan. Yaitu penuh dengan tantangan dan inovasi baru yang lahir dari pola pikir masyarakat lokal.

Hal ini senada dengan konsep yang dipaparkan oleh Liu et al (2017) dimana eksplorasi model produk pertanian skala kecil pada dasarnya dapat digabungkan dengan pariwisata dan menjadi strategi eko-inovasi. Contohnya di Suku Paiwan, Gunung Dawu Utara di Pegunungan Rentang Tengah Taiwan. Kawasan tersebut menjadi kawasan pertanian kopi sejak masa penjajahan Jepang antara 1895 dan 1945. Selama bertahun-tahun, sebagian besar petani asli telah menanam varietas tanaman kopi menggunakan metode tradisional dan non-komersial, menerapkan pendekatan terpadu secara sistematis dengan mengoptimalkan hubungan rantai pasokan untuk memperbaiki sisi baik dari hulu dan hilir layanan wisata. Secara bertahap

pertanian kecil berubah menjadi sejenis institusi pendidikan yang dapat menunjukkan kepada wisatawan atas metode menanam kopi organik berkualitas tinggi yang menarik wisatawan dari berbagai latar belakang.

Dengan demikian *gastronomy* menghubungkan keragaman di antara orang, budaya, dan gaya hidup terhadap berbagai jenis bahan makanan, peralatan, dan metode persiapan. Ini menjadi ciri, definisi, dan perbedaan, sehingga tidak hanya menyampaikan selera makanan akan tetapi mengkomunikasikan pengalaman budaya lokal. Pengalaman hidup masyarakat lokal dan wisatawan membawa pertukaran pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi ke satu tujuan. Ironisnya, masyarakat lokal yang konsen di bidang pertanian dan menjadi aktor utama di pedesaan banyak yang terlepas dari pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Sejatinya, komponen ini di bidang pariwisata agribisnis selain mengatur rekreasi juga petani kecil dapat memainkan peran penting dalam menarik wisatawan untuk terlibat langsung praktik wisata berkelanjutan sekaligus membantu melestarikan sistem budaya, sosial, dan lingkungan.

Keterlibatan para stakeholder baik pemerintah maupun perusahaan di industri pertanian juga dapat memposisikan diri sebagai rantai pasokan. Secara khusus, kolaborasi ini bisa berupa pedagang grosir, pengecer, pedagang kecil, perusahaan transportasi, produsen (makanan dan minuman), hingga supermarket. Untuk itu ukuran kinerja rantai pasokan makanan agribisnis lebih fokus pada efisiensi, fleksibilitas, daya tanggap, dan kualitas makanan. Hubungan ini diwujudkan dalam kebiasaan gaya hidup mereka untuk mengalami budaya asli. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam eko-inovasi harus menjelaskan situasi yang berbeda seperti sisi permintaan dan sisi penawaran

pariwisata pedesaan. Maksudnya, produk yang dijual oleh pedesaan pada dasarnya bisa diintegrasikan ke dalam pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.

Pendapat tersebut dipertajam oleh Arbogast et al. (2017) dimana pengelolaan tujuan pedesaan dihadapkan pada tantangan cukup besar karena untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi melalui pariwisata. Seperti yang terjadi pada salah satu desa di Tucker County, West Virginia. Tantangan terbesar adalah menjaga keaslian dan tempat, diversifikasi ekonomi, upah yang masih rendah, dan karyawan yang kurang, menghubungkan resor dengan usaha kecil dan komunitas, dan membangun visi bersama, identitas, serta koordinasi. Selain juga yang diperhatikan oleh pedesaan adalah peran pemasaran, tujuan pemasaran, mengejar target pasar, meminimalkan dampak negatif pariwisata, menghargai keunikan kawasan, koordinasi, kerjasama, serta kemitraan antara pelaku bisnis, pemerintah, dan pengusaha pariwisata pedesaan.

Mak et al. (2017) juga menyetujui jika partisipasi masyarakat merupakan strategi penting untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat tersebut masuk di tingkat yang berbeda (baik lokal, regional, maupun nasional) dan dalam keadaan tertentu. Melalui partisipasi masyarakat, pengembangan pariwisata akan lebih kuat karena menggabungkan beragam pendapat masyarakat lokal yang dapat membantu memenuhi harapan mereka selaku pelaku usaha pariwisata pedesaan. Hal ini jelas membuat masyarakat lebih mendukung pengembangan pariwisata karena benar-benar memiliki kesempatan berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan hingga evaluasi pariwisata pedesaan. Konsep ini termasuk membantu dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis.

Liu et al. (2017) menegaskan jika kebutuhan untuk memperbaiki keakuratan pengukuran emisi karbon adalah masalah utama yang harus diselesaikan industri pariwisata untuk mengurangi dampak buruk pada perubahan iklim dan lingkungan. Sehingga menilai dampak perubahan iklim terhadap industri pariwisata dan mengeksplorasi bagaimana pariwisata berperan aktif dalam merespons dan mengurangi perubahan iklim telah menjadi bidang penelitian penting yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Proses emisi karbon yang dihasilkan dari akomodasi dan layanan di wilayah destinasi wisata terutama dipengaruhi oleh tuntutan konsumsi turis dan jenis operasi pariwisata yang berbeda. Sebaiknya mengajak wisatawan untuk mengubah konsep konsumsi dan perilaku konsumen untuk mengurangi konsumsi makanan asap (bakar) yang tidak hanya memberi kesehatan tetapi juga sangat mengurangi penggunaan sumber energi seperti kayu bakar. Termasuk memberi rekomendasi agar penyedia layanan katering menghindari sayuran yang ditanam di rumah kaca dan dipanaskan serta dengan meningkatkan penggunaan energi bersih dan terbarukan saat mempersiapkan makanan.

3. Metodologi Penelitian

Kegiatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif ini dilakukan secara induktif. Sehingga lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data, sekaligus lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Hasil penelitian data disajikan dalam bentuk teks naratif atau gagasan yang mengidentifikasi prospek bisnis pariwisata yang dilaksanakan sebagai pendukung kesejahteraan masyarakat. Data yang bersumber dari studi pustaka ini diperoleh sebagai bahan bacaan terkait potensi kesejahteraan masyarakat

melalui usaha di destinasi wisata, khususnya pada wilayah pedesaan.

4. Pembahasan

Program pariwisata yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia pada dasarnya dapat dibangun dan dikembangkan atas kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena wilayah Indonesia terbesar adalah pedesaan, sudah dapat dikembangkan bahwa pariwisata juga masuk ke ranah pedesaan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa jumlah desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.184 yang terdiri dari 74.754 desa dan 8.430 kelurahan. Adapun dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik disebutkan bahwa jumlah desa/kelurahan di Indonesia sebanyak 82.030. Artinya, semakin banyak desa yang ada maka semakin heterogen pula prinsip yang dipegang oleh masing-masing desa.

Perbedaan yang ada di masing-masing pedesaan sudah semestinya tetap mencerminkan jati diri bangsa. Sehingga beragam kebudayaan, tradisi, keindahan alam, kerajinan dan lain yang menjadi identitas suatu wilayah merupakan kekayaan milik Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 3, dimana penguasaan yang dimaksud adalah mengatur, membina, mengembangkan, dan mengawasi segala kegiatan yang ada di masyarakat. Dimana elemen masyarakat sebagai bagian dari pembangunan terlibat untuk memutuskan konsep pedesaan yang bermuara pada destinasi wisata. Tentunya melibatkan semua unsur dari tingkat RT hingga kepala desa dan konsep

pengembangan pedesaan dapat berjalan dengan baik (Syah, 2014).

Peluang pedesaan yang ada di Indonesia terdiri dari ragam daya tarik. Mulai dari tradisi, budaya, lingkungan, dan aktivitas yang belum tentu dimiliki pedesaan lain. Bagaimanapun adapula aspek kepariwisataan yang dibangun dan dikembangkan dari pola kehidupan masyarakat lokal dan tentunya menjadi kewajiban bersama untuk menjaga alam serta merawat dengan baik. Sehingga kelangsungan ekosistem hidup yang ada di dalamnya juga terjamin oleh seluruh aspek pariwisata. Oleh karena itu, bersama-sama mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk berlibur bagi wisatawan. Pembangunan dan pengembangan harus lebih diarahkan untuk menjawab harapan wisatawan yang menginginkan wisata alternatif. Pola ini menjadi salah satu agenda besar pemerintah bersama masyarakat lokal untuk memperkenalkan aset potensial.

Kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut juga menjadi poin penting dari pedesaan yang berbasis pada ekowisata. Karena pada dasarnya masyarakat lokal tersebut telah memelihara dan memiliki nilai-nilai dari para leluhur. Karena konsep pedesaan yang digabung dengan pariwisata dan saat dikelola dengan prinsip yang baik jelas memberikan nilai positif untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam pedesaan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan pedesaan melalui pembinaan masyarakat sehingga di antara seluruh masyarakat memiliki pemikiran yang sama dalam mencapai kesejahteraan. Sesuai dengan 11 asas dalam UU No 10/2009 tentang Kepariwisata. Yaitu, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Sebagai satu kesatuan antara pemerintah dan masyarakat. segala terobosan-terobosan

di masa depan tetap terus digali oleh masyarakat di pedesaan. Dengan harapan ketika wisatawan yang datang merasa jenuh dengan model-model pariwisata yang ada di pedesaan, terdapat alternatif lain untuk berkeliling. Artinya, butuh inovasi yang tinggi untuk mengelola pembangunan dan pengembangan pedesaan sebagai destinasi wisata pilihan sesuai kemampuan yang dimiliki masyarakat. Ditambah dengan kondisi saat ini bahwa pedesaan sudah mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat, maka sejatinya berbagai program sudah mulai digalakkan, misalnya melalui Alokasi Dana Desa. Walau dalam implementasinya masih butuh pengetahuan yang mendalam karena, pada dasarnya pembangunan pedesaan bukan sekedar secara fisik.

Lebih dari itu, diharapkan perekonomian di desa ikut maju dan membawa kesejahteraan bersama. Tentu saja program-program pemberdayaan dari sisi SDM, mengoptimalkan perekonomian melalui peluang yang ada, serta sistem informasi dapat disiapkan dengan matang dalam mendukung pembangunan desa. Artinya, aparatur desa juga harus diperhatikan supaya dalam mengelola anggaran desa dapat sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Jangan sampai terjadi ketimpangan pengelolaan atau ketidaktahuan desa akan dikemanakan anggaran yang datang dari pemerintah pusat. Dana desa yang telah diterima dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur macam jalan desa, irigasi, jalan usaha tani dan sanitasi. Selain juga muncul berbagai kegiatan usaha ekonomi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan proyek-proyek desa seperti usaha material, kuliner, pakaian, dan jasa transportasi (Syah, 2015).

Modal awal yang diterima oleh desa pada dasarnya mampu menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena

akan memanfaatkan potensi untuk dikenal secara luas oleh wisatawan. Semakin besar PAD yang didapat, akan semakin menguatkan jatidiri sebagai daerah yang mandiri. Bahkan, akan memungkinkan pembangunan dan pengembangan di desa tersebut semakin tahun akan semakin gencar dilaksanakan. Di samping itu, 'pintu' lapangan pekerjaan mulai terbuka lebar dan ikut membantu daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Jika Pemda mengakui desa kurang dapat mengelola dengan baik, maka dapat melaksanakan kegiatan wisata dengan menjalin kerjasama pihak swasta. Dengan catatan terdapat MoU keduanya yang berisi hak dan kewajiban secara detail (Syah, 2014).

Supaya dalam waktu tertentu masyarakat tidak pasang surut dalam mengembangkan usaha maka pemerintah desa dapat membentuk lembaga seperti Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan pengelola desa wisata secara khusus agar grafis target kunjungan wisatawan tetap merangkak naik. Dalam Buku Pedoman POKDARWIS yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata pada 2012 dijelaskan detail mengenai mekanisme POKDARWIS. Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya pada hakikatnya melibatkan peran dari seluruh *stakeholder* yang ada dan terkait yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Karena masing-masing tidak dapat berdiri sendiri, maka harus saling bersinergi untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang disepakati.

Pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangan menjalankan peran dan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat peraturan (regulator) dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan. Sementara kalangan swasta (baik itu pelaku usaha/industri pariwisata) melalui sumber daya, modal dan jejaring yang dimiliki

sebagai pengembang dan atau pelaksana pembangunan kegiatan kepariwisataan. Adapun masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki berupa adat, tradisi, dan budaya berperan sebagai tuan rumah sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan dan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Untuk itu, pembangunan pariwisata harus diciptakan mulai dari lingkungan dan suasana yang kondusif.

Konsep dari sadar wisata dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif. Dimana masyarakat menyadari peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif. Di samping itu, masyarakat menyadari hak dan kebutuhan untuk menjadi pelaku wisata sebagai wujud kebutuhan dasar untuk berekreasi maupun khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air. Kedua elemen tersebut juga harus mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam sapta pesona, yaitu mewujudkan lingkungan yang kondusif dan ideal bagi perkembangan kegiatan kepariwisataan. Sapta pesona itu meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Bagi masyarakat sendiri sadar wisata adalah prospek yang baik (Syah, 2017).

Sebagai negara dengan penduduk pedesaan yang paling banyak, maka sudah semestinya mengedepankan konsep kebersihan. Pandangan hidup masyarakat mengenai kebersihan khususnya di destinasi wisata harus ditekankan dan menjadi aspek terpenting sehingga keasrian terlindungi. Konsep kebersihan harus diimplementasikan oleh pemerintah melalui kebijakan dibuat bersama masyarakat untuk kenyamanan wisatawan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat ragam budaya dan

karakter wisatawan yang dibawa dari daerah/negara asal. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengikat wisatawan demi kenyamanan lingkungan. Misalnya ketentuan membuang sampah sembarangan yang berimbas mencemari lingkungan dan tidak sedap dipandang mata.

Selain konsep pengolahan sampah yang baik dan modern dengan bantuan teknologi, pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah di lapangan pun harus diadakan secara intens. Menyelenggarakan polisi kebersihan (seperti halnya polisi lingkungan di Singapura) menjadi salah satu solusi. Tugas polisi kebersihan tersebut hanya memantau dan menindak orang-orang yang membuang sampah sembarangan atau membuat lingkungan destinasi wisata (atraksi produk) tidak menarik. Polisi tersebut juga harus bekerja profesional dan tanpa lelah karena destinasi wisata juga berjalan selama 24 jam. Pola kerja *shift* juga bisa diterapkan sehingga tetap fokus menjaga keindahan dan kebersihan destinasi wisata. Alat bantu modern seperti CCTV pun dipasang sebagai bukti untuk menjerat pelaku sekaligus memantau destinasi wisata dari jarak jauh yang tidak bisa dijangkau polisi karena luasnya lokasi (Syah and et al, 2017).

Untuk itu, tenaga yang bergerak pada destinasi wisata terutama yang ada di wilayah pedesaan harus memahami betul tata aturan yang ada. Tidak hanya menguasai bidang pariwisata tertentu melainkan juga sudah mengantongi sertifikasi profesi khusus kepariwisataan. Biasanya dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dari 33 sertifikasi yang bisa diberikan untuk bidang pariwisata, terdapat satu yang mencakup unsur kebersihan lingkungan tersebut, yakni Pembina Masyarakat Daerah dan Daya Tarik Wisata. Dasar dari pemikiran ini

adalah pariwisata terbukti telah mengangkat kehidupan masyarakat, karena sektor ini mampu menggerakkan roda perekonomian di segala lapisan masyarakat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Tenaga kepariwisataan yang disiapkan dengan melihat potensi dan keahlian yang dimiliki. Di sini, harus dipilih tenaga kerja yang kompeten, yakni mempunyai dasar kepariwisataan khususnya konsep kebersihan lingkungan yang unggul. Hal ini diperoleh ketika tenaga kerja yang dimaksud memiliki pengalaman yang baik dalam menangani soal kebersihan juga menyadarkan orang baik wisatawan maupun masyarakat lokal yang belum memahami kebersihan lingkungan. Untuk itu, butuh materi yang baik melalui pelatihan khusus mengenai konsep layanan yang di dalamnya memadukan prinsip ‘mengajarkan’ orang secara halus sehingga tidak ada kesan menggurui. Selanjutnya mewujudkan gerakan Aku Cinta Indonesia (ACI) sebagai wujud rasa memiliki untuk dikembangkan menjadi lebih baik.

Dengan demikian, pemerintah bersama masyarakat lokal pun dapat mengembangkan model pariwisata dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Beberapa kekayaan yang ternyata dimiliki pedesaan antara lain wisata petualangan yang biasanya ada di pegunungan, wisata agro dengan salah satu potensi untuk pendidikan, wisata bahari dengan nuansa pesisir pantai, wisata kuliner yang memperkenalkan masakan khas daerah, wisata budaya dan sejarah, dan wisata kreatif yang identik dengan kerajinan tangan. Hal ini yang juga dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul di DI Yogyakarta. Tak heran saat akhir pekan, terutama musim liburan tiba jalan-jalan menuju wisata Kabupaten Gunungkidul senantiasa ramai oleh wisatawan.

Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul

merupakan program pengentasan kemiskinan melalui sistem perencanaan. Melalui destinasi wisata tersebut, perekonomian masyarakat meningkat karena adanya pendapatan yang datang secara terus menerus. Ini merupakan kemajuan dari era terdahulu dimana kebijakan dari pemerintah dibuat belum bisa meningkatkan pendapatan per kapita pada keluarga miskin (Syah, 2017). Dengan demikian, pola ekonomi kreatif yang dimainkan oleh masyarakat lokal harus terus bersanding dengan kenyataan sebagai ‘penjual’ jasa kepada wisatawan. Untuk dapat memperkuat posisi masyarakat lokal, ada beberapa hal terkait sistem yang perlu dikembangkan lebih dalam. Langkah ini bisa dengan terus mencari tahu keunikan dari pariwisata bernuansa kearifan lokal.

Konsep pemberdayaan masyarakat Kabupaten Gunungkidul tersebut menurunkan angka kemiskinan di beberapa lokasi wisata. Pada Sabtu dan Minggu Kabupaten Gunungkidul bisa mengalami kemacetan hingga 2 jam karena satu hari kedatangan bus mencapai ratusan, belum termasuk mobil dan sepeda motor. Walau banyak kesamaan untuk destinasi wisata namun masing-masing memiliki ciri khas. Pemerintah dan perusahaan BUMN dalam hal ini memberikan *support* melalui pelatihan, CSR, juga sarana prasarana dengan melakukan koordinasi dinas terkait. Kunjungan wisatawan juga di luar target, laporan terakhir pada 2015 dicanangkan 2 juta wisatawan yang datang melebihi angka tersebut. Contoh kongkrit yang dapat dilaksanakan adalah Karangmojo (Goa Pindul) untuk menjadi kawasan wisata. Dimana masyarakat menjadi berdaya saing dari semula tak berdaya secara perekonomian.

Sehingga pendapatan per kapita di Goa Pindul menjadi naik dan otomatis kemiskinan menurun. Apalagi terdapat wisata lain selain Goa Pindul. Misal Gunung

Nglanggran, Bukit Sriten, Air Terjun Sri Getuk, Green Village, Pantai Baron, Pantai Pulangsawal/ Indrayanti, Pantai Siung, Pantai Ngobaran, Pantai Nampu, Pantai Nguyaan, Pantai Ngedan, Pantai Gesing, dan lain-lain. Walau beragam pilihan pantai terdapat di Kabupaten Gunungkidul, namun masing-masing memiliki *view* yang berbeda dan ada ciri khas. Nampu misalnya, bisa melihat *snorkling*. Ada pula pantai yang bisa melihat air terjun di laut. Kegiatan ekonomi kreatif yang dibangun masyarakat bermula dengan mulai membuka akses dan Pemerintah Daerah Gunungkidul memberikan fasilitas melalui pelatihan dan pembentukan POKDARWIS.

Intinya, sistem yang berlaku pada suatu destinasi wisata seperti pedesaan pada dasarnya sudah berjalan. Dimana, segala informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan dapat diperoleh secara lengkap dan detail dari data-data yang terdapat dalam website mengenai pariwisata. Hal ini juga yang ternyata dilakukan oleh Kabupaten Bogor. Namun, jika dibandingkan dengan desa-desa wisata yang ada di luar Kabupaten Bogor misalnya Kabupaten Gunungkidul di Yogyakarta jelas masih kalah jauh. Walau demikian, pemerintah dan masyarakat lokal terus berupaya untuk mengembangkan sistem destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga menjadi lebih baik dan dapat dengan sempurna menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan terkait produk destinasi wisata yang menarik.

Kabupaten Bogor mengakui masih minim wisatawan dari mancanegara. Dari 8 juta wisatawan baru sekitar 5000 pengunjung yang berstatus warga negara asing dengan didominasi oleh Timur Tengah. Namun, melalui konsep evaluasi yang sedang digalakkan maka wisatawan terus berdatangan sehingga mampu memaksimalkan potensi yang ada di destinasi wisata Kabupaten Bogor. Terutama

memasuki Juni hingga September yang menjadi musim kunjungan wisatawan asal Timur Tengah karena masa libur. Dilihat dari lama tinggal di Kabupaten Bogor, wisatawan mancanegara ini tergolong baik yaitu antara 7 hingga 10 hari. Bahkan perputaran uang di dua desa sangat baik. Terbukti, di dua desa salah satunya Tugu Utara yang mana masyarakat lokal menjual jasa pertukaran uang di 16 *money changer* mencapai Rp 3 miliar.

Artinya, sudah muncul geliat dari wisatawan mancanegara untuk melirik destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya pedesaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah *support* masyarakat lokal untuk lebih aktif dalam menjual keunikan-keunikan pariwisata di desa wisata yang tersebar di Kabupaten Bogor. Konsep inilah yang kemudian harus dikembangkan untuk memperoleh lebih banyak wisatawan mancanegara selain juga menyasar wisatawan domestik yang tidak hanya datang dari wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun juga bisa mendatangkan wisatawan dari luar wilayah tersebut karena mendengar, penasaran, atau sudah beberapa kali datang ke destinasi wisata di Kabupaten Bogor. Inilah kunci keberhasilan masyarakat lokal untuk wisata di pedesaan.

Jika dikaji lebih dalam, usaha pengembangan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah baik. Dimana beragam fasilitas melalui kegiatan terus diselenggarakan supaya masyarakat lokal memiliki kemampuan dalam mengelola destinasi wisata. Untuk setiap tahun, pemerintah Kabupaten Bogor selalu mengadakan pelatihan untuk mendirikan usaha tani. Termasuk berbagai pelatihan yang bernuansa manajemen, pelatihan bagaimana pengelolaan *homestay*, pelatihan bagaimana membuat kemasan kuliner makan minum bagi wisatawan, pelatihan

bagaimana membuat paket-paket wisata yang menarik untuk wisatawan, juga jadi *tour guide* yang dibutuhkan oleh wisatawan. Seluruh program sengaja dimaksimalkan dan dicoba untuk diadakan secara komprehensif. Bahkan sudah beberapa perguruan tinggi yang mencoba membantu untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bogor.

Bentuk dukungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lokal adalah untuk mengembangkan konsep wirausaha. Itulah yang menjadi satu-satunya pilihan saat ini dengan memanfaatkan pariwisata yang berbasis ekowisata dengan mengkombinasikan keahlian masyarakat lokal. Artinya, ada kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk membangun desa wisata sekaligus diberikan kesempatan mengembangkan diri dengan kebebasan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Termasuk juga membuka kesempatan bagi masyarakat lain untuk ikut bekerja (peluang membuka kesempatan/lapangan kerja) yang mana kondisi saat ini banyak pengangguran. Dengan seperti ini sangat membantu masyarakat lokal untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu pemerintah meminimalisir pengangguran.

Langkah lain yang ditempuh adalah dengan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat lokal di pedesaan untuk tidak puas atas hasil yang dicapai. Pola ini kemudian dikembangkan dengan belajar (studi banding) ke daerah di luar daerah mereka. Misalnya Kabupaten Bogor yang tahun lalu mengirimkan perwakilan desa-desa wisata ke DI Yogyakarta. Melalui studi banding tersebut, diharapkan masyarakat memahami segala aspek yang harus diperhatikan dalam membangun dan mengembangkan desa wisata. Sementara untuk tahun ini sebanyak 30 peserta melakukan studi banding ke Desa Wisata Cibuntu di Kuningan. Cibuntu merupakan

sebuah desa wisata yang termasuk unik, karena di lingkungan desa banyak ditemukan situs-situs purbakala.

Dengan demikian, segala usaha yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat lokal sudah sesuai dengan capaian untuk keberhasilan dalam meraih kemajuan destinasi wisata pedesaan. Ada kesiapan khusus dalam menyambut wisatawan yang datang dengan diperkenalkan potensi yang ada. Hanya saja kekurangan yang ada di bidang promosi adalah website yang dimiliki untuk desa wisata. Seiring berjalannya waktu, ekowisata yang diperhatikan oleh masyarakat yang hidup di pedesaan justru membawa lingkungan dan masyarakat setempat menjadi lebih maju. Bahkan, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka keluar kampung dan mengadu nasib ke beberapa kota besar (urbanisasi).

5. Penutup

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan di atas adalah:

1. Program pariwisata yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dibangun dan dikembangkan atas kerjasama dan koordinasi pemerintah dan masyarakat. Karena wilayah terbesar adalah pedesaan, maka ranah pariwisata juga bisa masuk ke pedesaan.
2. Model pariwisata dengan tujuan menyejahterakan masyarakat dapat berupa kekayaan alam yang dikelola seperti wisata petualangan (pegunungan), wisata agro, wisata bahari, wisata kuliner (khas daerah), wisata budaya dan sejarah, dan wisata kreatif (kerajinan tangan).

Adapun saran yang diberikan dari kesimpulan di atas yaitu:

1. Pemerintah dapat terus mengeksplorasi saran dan masukan dari masyarakat lokal di pedesaan untuk memaksimalkan kemandirian mereka di bidang pariwisata.
 2. Segala aspek kehidupan pendukung yang belum dimiliki dapat difasilitasi, seperti sertifikasi profesi, fasilitas, aksesibilitas, dan sarana pendukung lain yang baik.
 3. Menjadi program unggulan masing-masing pemerintah daerah dalam memajukan pedesaan masing-masing sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat.
- 6. Daftar Pustaka**
- Arbogast, Doug and et al. (2017). *DMOs and Rural Tourism: a Stakeholder Analysis the Case of Tucker County, West Virginia*. Sustainability. 9 (10). 1813. 10 October 2017.
- Coles, Tim and Rob Fish (2017). *Tourism in Sub-Global Assessments of Ecosystem Services*. Journal of Sustainable Tourism. Pages 1529-1546. 20 March 2017.
- Cerro, Ana María Campón, and et al. (2017). *Rural Destination Development Based on Olive Oil Tourism: The Impact of Residents' Community Attachment and Quality of Life on Their Support for Tourism Development*. Sustainability. 9 (9). 1624. 13 September 2017.
- Liu, Jun, and et al. (2017). *Use of Household Survey Data as a Tool to Assess the Carbon Footprint of Rural Tourist Accommodation and Related Services in China: a Case Study of Mount Qingcheng*. Sustainability. 9 (10). 1680. 21 September 2017.
- Liu, Shang-Yu, and et al. (2017). *a Conceptual Framework for Agri-Food Tourism as an Eco-Innovation Strategy in Small Farms*. Sustainability. 9 (10). 1683. 21 September 2017.
- Mak, Bonnie K. L., and et al. (2017). *Community Participation in the Decision-Making Process for Sustainable Tourism Development in Rural Areas of Hong Kong, China*. Sustainability. 9 (10). 1695. 22 September 2017.
- Nichols, Geoff, and et al. (2017). *The 2012 Olympic Ambassadors and Sustainable Tourism Legacy*. Journal of Sustainable Tourism. Pages 1513-1528. 07 March 2017.
- Syah, Firman. (2017). *Model Ekonomi Kreatif Pada Bisnis Ekowisata Gunungkidul*. Prosiding Seminar 'Kemitraan Strategis dalam Mendukung Ekonomi Kreatif yang Berbasis Kearifan Lokal'. ISSN. 2355-2883. Vol. 4. No. 01. Februari 2017. Hal. 85-97. Jakarta: LPPM Institut STIAMI.
- Syah, Firman. (2017). *Strategi Mengembangkan Desa Wisata*. Prosiding Seminar Multi Disiplin Ilmu dan Call Papers Ke-3 'Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pemberdayaan Potensi Daerah untuk Meningkatkan Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif'. ISBN. 978-979-3649-99-3. Juli 2017. Hal. 335-334. Semarang: Sendi_U Unisbank.
- Syah, Firman, et al. (2017). *Implementasi Kebijakan Kebersihan terhadap Perilaku Wisatawan di Destinasi Wisata*. Prosiding Seminar Nasional Pariwisata 'Pariwisata dan Pembangunan'. ISBN. 978-602-61803-5-3. Agustus 2017. Hal. 86-99. Jember: FISIP Universitas Jember.
- Syah, Firman. (2014). *Membangun Konsep Kelurahan/Desa Wisata*. https://news.detik.com/opini/d-2586516/membangun-konsep-kelurahan-desa-wisata?_ga=2.249140487.1473347882.

[1500425508-1271466504.1500092356](https://news.detik.com/opini/d-2595172/destinasi-wisata-sebagai-aset-daerah?_ga=2.249140487.1473347882.1500425508-1271466504.1500092356)

(akses 18 Juni 2017).

Syah, Firman. (2014). *Destinasi Wisata Sebagai Aset Daerah*.

https://news.detik.com/opini/d-2595172/destinasi-wisata-sebagai-aset-daerah?_ga=2.249140487.1473347882.1500425508-1271466504.1500092356

(akses 18 Juni 2017).

Syah, Firman. (2015). *Mengoptimalkan Sumber Daya Desa (SDD)*.

https://news.detik.com/opini/d-3045194/mengoptimalkan-sumber-daya-desa-sdd?_ga=2.249140487.1473347882.1500425508-1271466504.1500092356

(akses 18 Juni 2017).

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945
Pasal 33.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Kepariwisata.